

**STRATEGI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA PADA DIMENSI PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BOGOR**

Disusun Oleh :

NAMA : SAMMY LUGINA
NPM : 2342021050
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Telah diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2025**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Sammy Lugina
NPM : 2342021050
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Dimensi Pendidikan di Kabupaten Bogor
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : Strategies to Improve the Human Development Index Based on the Education Dimension in Bogor Regency

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing



Dr. Edy Sutrisno, SE, M.Si

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Sammy Lugina
NPM : 2342021050
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis : Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
Pada Dimensi Pendidikan di Kabupaten Bogor

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga
Administrasi Negara, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 Juni 2025
Pukul : 13.00 – 14.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Dr. Asropi, SIP., M. Si :
Sekretaris : Dr. Firman Hadi Rivai, S. STP., MPA. :
Anggota : Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M. Si :
Pembimbing : Dr. Edy Sutrisno, SE., M.Si :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sammy Lugina
NPM : 2342021050
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya buat berjudul “Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Dimensi Pendidikan di Kabupaten Bogor” adalah benar keasliannya dan merupakan hasil karya saya sendiri serta bukan hasil dari penelitian yang telah diajukan guna memperoleh suatu gelar akademik pada universitas ataupun lembaga yang sederajat. Bilamana pada kemudian hari penulisan tesis ini adalah hasil penjiplakan maupun plagiat atas hasil karya orang lain, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab atas menerima sanksi menurut peraturan serta ketentuan yang berlaku pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Juli 2025

Pembuat Pernyataan,



Sammy Lugina

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah, ridho, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini meskipun dengan segala keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan. Tesis dengan judul “Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Dimensi Pendidikan di Kabupaten Bogor” disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.) pada Jurusan Administrasi Publik, Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi Manajemen Pembangunan Daerah, Politeknik STIA LAN Jakarta.

Peneliti menyadari terdapat berbagai kekurangan terhadap isi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu, memberikan dukungan, dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, koreksi, saran, masukan, serta motivasi dalam penyusunan tesis ini.
2. Seluruh Dewan Penguji, baik pada sidang proposal maupun sidang akhir tesis, yang telah memberikan berbagai masukan, saran, dan pemikiran untuk menyempurnakan tesis ini.
3. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S. Sos, M.Si., selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, serta seluruh dosen pengajar Program Magister Manajemen Pembangunan Daerah, serta staf administrasi akademik dan perpustakaan atas ilmu, bantuan, dan pelayanan selama masa studi.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor yang telah memberikan beasiswa kepada peneliti, sehingga peneliti dapat meraih pendidikan pascasarjana di Politeknik STIA LAN Jakarta.

5. Seluruh Pimpinan, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang pada Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bogor atas dukungan, motivasi, dan izin tugas belajar yang diberikan.
6. Seluruh narasumber yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
7. Almarhum Ayahanda Sunyoto dan Ibunda Apt. Ana Lusina, S. Farm. tercinta atas doa, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan kepada peneliti.
8. Istri tercinta, dr. Muflikha Mayazi, atas cinta, doa, dan dukungan yang tiada henti sejak awal perkuliahan hingga selesainya tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Manajemen Pembangunan Daerah Kelas Kabupaten Bogor atas semangat kebersamaan, tukar ilmu, serta dukungan selama masa studi dan penyusunan tesis.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Namun, besar harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perencanaan dan pembangunan demi meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bogor.

Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

Jakarta, 18 Juli 2025



Sammy Lugina

ABSTRAK

Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Pada Dimensi Pendidikan di Kabupaten Bogor

Sammy Lugina, Edy Sutrisno

2342021054@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi pendidikan sangat bergantung pada capaian indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kabupaten Bogor sebagai salah satu wilayah dengan populasi terbesar di Indonesia memiliki tantangan serius dalam mempercepat peningkatan kedua indikator tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab belum optimalnya peningkatan HLS dan RLS melalui belanja daerah serta merumuskan strategi yang dapat mengarahkan alokasi anggaran pendidikan secara lebih efektif dan berkeadilan. Pendekatan penelitian menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan teknik analisis deskriptif, SWOT, dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan penyebaran kuesioner terstruktur berbasis AHP kepada pemangku kepentingan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi satuan pendidikan menengah, keterbatasan tenaga pendidik ASN, serta akses pendidikan yang tidak merata di wilayah terpencil menjadi hambatan utama. Analisis AHP mengidentifikasi bahwa kelemahan internal memiliki bobot pengaruh tertinggi dalam menghambat peningkatan HLS dan RLS. Rekomendasi strategi diarahkan pada pemerataan pembangunan SMP, penguatan kapasitas dan distribusi guru, serta pengembangan sistem perencanaan belanja berbasis data spasial. Temuan ini memperkuat pentingnya integrasi lintas sektor dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pendidikan berbasis bukti. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kerangka strategi pembangunan pendidikan daerah yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Pendidikan, SWOT-AHP, Kabupaten Bogor.

ABSTRACT

Strategies to Improve the Human Development Index Based on the Education Dimension in Bogor Regency

Sammy Lugina, Edy Sutrisno
2342021054@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

The improvement of the Human Development Index (HDI) in the education dimension heavily relies on the achievements of Expected Years of Schooling (EYS) and Mean Years of Schooling (MYS). Bogor Regency, one of the most populous regions in Indonesia, faces critical challenges in accelerating progress in both indicators. This study aims to analyze the underlying factors of the suboptimal improvement in EYS and MYS through local government spending and to formulate appropriate strategies to enhance the effectiveness and equity of education budget allocation. The research employs a mixed-methods approach using descriptive analysis, SWOT, and the Analytical Hierarchy Process (AHP). Data collection was conducted through document review, in-depth interviews with key informants, and structured AHP-based questionnaires administered to local stakeholders. The findings reveal that the unequal distribution of secondary schools, shortage of civil servant teachers, and limited access to education in remote areas are the primary constraints. The AHP analysis identifies internal weaknesses as the most influential factor hindering educational outcomes. Strategic recommendations emphasize the equitable development of junior secondary schools, capacity-building and equitable placement of teachers, and the advancement of spatial data-driven budget planning systems. The results underscore the necessity for cross-sectoral integration and stakeholder engagement in evidence-based education policy formulation. This study contributes to the development of a more adaptive, participatory, and outcome-oriented strategic framework for regional education development aimed at enhancing the quality of human capital.

Keywords : *Human Development Index, Expected Years of Schooling, Mean Years of Schooling, Education, Bogor Regency.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Penelitian	10
C. Identifikasi Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	17
1. Tinjauan Kebijakan.....	17
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	17
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	19
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.....	21
d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 ..	22
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS Reguler	22
f. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	23
g. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.....	25

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015–2019 (dan Perubahannya Tahun 2020–2024)	27
2. Tinjauan Teoritis.....	27
a. Administrasi Publik	27
b. Administrasi Pembangunan Daerah	29
c. Pembangunan Manusia	31
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	32
e. Definisi Strategi	40
f. Definisi Analisis SWOT	41
g. Definisi Analisis AHP	44
C. Kerangka Pikir Penelitian	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
A. Pendekatan Penelitian.....	47
B. Waktu dan Tempat Penelitian	47
C. Objek Penelitian	47
1. Operasionalisasi Konsep	49
2. Langkah-Langkah Penelitian.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Teknik Pengolahan Data.....	56
F. Teknik Analisis Data	57
1. Analisis Deskriptif	58
2. Identifikasi Faktor SWOT	59
3. Penyusunan Hirarki AHP	60
4. Penyusunan Kuesioner AHP	62
5. Pengolahan Data AHP	63
G. Uji Keabsahan Data dan Instrumen Penelitian	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Gambaran Lokasi Penelitian	68
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	68
2. Wilayah Pengembangan.....	69
3. Letak dan Kondisi Geografis.....	70
4. Potensi Sumber Daya Alam	71
5. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	74
6. Kondisi Eksisting IPM di Kabupaten Bogor	75
7. Kondisi Eksisting HLS di Kabupaten Bogor	77

8. Kondisi Eksisting RLS di Kabupaten Bogor.....	79
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	82
1. Faktor-Faktor Penyebab Belum Optimalnya Indeks Pembangunan Manusia Pada Dimensi Pendidikan di Kabupaten Bogor	82
a. Aksesibilitas terhadap Pendidikan	82
b. Jumlah dan Distribusi Sekolah.....	84
c. Fasilitas Pendidikan yang Memadai.....	90
d. Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidik	95
2. Hasil Identifikasi Faktor SWOT	99
a. Kekuatan (<i>Strengths</i>)	99
b. Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	100
c. Peluang (<i>Opportunities</i>)	102
d. Ancaman (<i>Threats</i>).....	104
3. Hasil Analisis AHP	105
a. Hasil AHP Kriteria Utama SWOT	105
b. Hasil AHP Sub Kriteria SWOT	107
1) Sub Kriteria <i>Strength</i> (S).....	107
2) Sub Kriteria <i>Weakness</i> (W)	107
3) Sub Kriteria <i>Opportunity</i> (O).....	108
4) Sub Kriteria <i>Threat</i> (T).....	109
c. Rasio Konsistensi	110
C. Pembahasan Hasil Penelitian	111
1. Interpretasi Hasil AHP (Prioritas Faktor Kunci)	111
2. Perumusan Alternatif Strategi Potensial Berbasis Prioritas Faktor	115
3. Implikasi Hasil Analisis dan Strategi terhadap Optimalisasi Belanja Daerah.....	121
4. Sintesis Penelitian.....	125
D. Peran Pemangku Kepentingan dalam Strategi Peningkatan HLS dan RLS di Kabupaten Bogor	126
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	132
A. Simpulan	132
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA.....	136

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3.1.	Operasionalisasi Konsep.....	50
Tabel 3.2.	Langkah-Langkah Penelitian	51
Tabel 3.3.	Daftar Informan Kunci	55
Tabel 3.4.	Skala Perbandingan Berpasangan	62
Tabel 4.1.	Batas Wilayah Kabupaten Bogor	68
Tabel 4.2.	Wilayah Pengembangan Kabupaten Bogor	70
Tabel 4.3.	Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Bogor.....	71
Tabel 4.4.	Data Peserta Didik dan Rombel SD dan SMP per Kecamatan di Kabupaten Bogor.....	85
Tabel 4.5.	Analisis Kebutuhan Sekolah Dasar per Kecamatan di Kabupaten Bogor	86
Tabel 4.6.	Analisis Kebutuhan Sekolah Menengah Pertama per Kecamatan di Kabupaten Bogor.....	88
Tabel 4.7.	Data Fasilitas SD dan SMP per Kecamatan di Kabupaten Bogor ...	90
Tabel 4.8.	Kondisi Bangunan Fisik SD dan SMP di Kabupaten Bogor	92
Tabel 4.9.	Data Jumlah Sekolah dan Ruang Kelas di Kabupaten Bogor.....	92
Tabel 4.10.	Data Kondisi Ruang Kelas SD dan SMP di Kabupaten Bogor	93
Tabel 4.11.	Data Kondisi Ruang Kelas per Kecamatan di Kabupaten Bogor	94
Tabel 4.12.	Jumlah Pendidik SD Menurut Status Kepegawaian Tiap Kecamatan di Kabupaten Bogor	96
Tabel 4.13.	Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Utama SWOT	106
Tabel 4.14.	Bobot Prioritas (Global) Kriteria Utama SWOT	106
Tabel 4.15.	Bobot Prioritas Sub Kriteria <i>Strength</i>	107
Tabel 4.16.	Bobot Prioritas Sub Kriteria <i>Weakness</i>	108
Tabel 4.17.	Bobot Prioritas Sub Kriteria <i>Opportunity</i>	109
Tabel 4.18.	Bobot Prioritas Sub Kriteria <i>Threat</i>	109
Tabel 4.19.	Rekapitulasi <i>Consistency Ratio</i> (CR) Analisis AHP	111
Tabel 4.20.	Bobot Global Faktor SWOT	112

Tabel 4.21. Strategi Peningkatan IPM Berdasarkan Dimensi Pendidikan.....	121
Tabel 4.22. Peran Pemangku Kepentingan	127
Tabel 4.23. Rencana Aksi Strategis Peningkatan IPM Berdasarkan Dimensi Pendidikan	130



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. IPM Kabupaten Bogor Tahun 2016-2024.....	1
Gambar 1.2. Perbandingan IPM Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024	2
Gambar 1.3. Perbandingan IPM Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	3
Gambar 1.4. HLS Kabupaten Bogor Tahun 2010-2024	4
Gambar 1.5. Perbandingan HLS Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024	5
Gambar 1.6. Perbandingan HLS Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	6
Gambar 1.7. RLS Kabupaten Bogor Tahun 2010-2024	7
Gambar 1.8. Perbandingan RLS Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024	7
Gambar 1.9. Perbandingan RLS Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	9
Gambar 2.1. Diagram Analisis SWOT	42
Gambar 2.2. Kerangka Pikir	46
Gambar 3.1. Hirarki Keputusan pada AHP	61
Gambar 4.1. Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2023	74
Gambar 4.2. Perbandingan LPP Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	75
Gambar 4.3. Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten Bogor Tahun 2017-2024	76
Gambar 4.4. Laju Pertumbuhan HLS Kabupaten Bogor Tahun 2010-2024.....	78
Gambar 4.5. HLS Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2024	79
Gambar 4.6. Laju Pertumbuhan RLS Kabupaten Bogor Tahun 2010-2024.....	80
Gambar 4.7. RLS Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2024	81

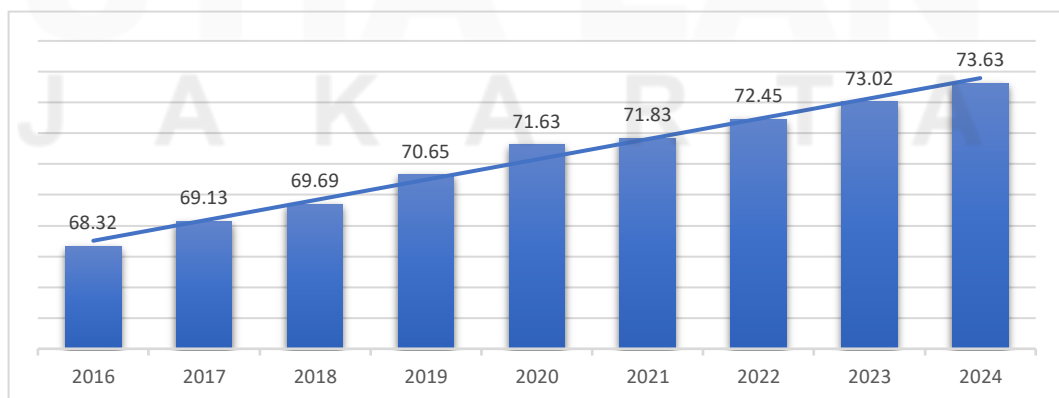
BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan tujuan utama dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kemajuan pembangunan suatu daerah. IPM merupakan cerminan kesejahteraan dan kesuksesan suatu daerah dalam meningkatkan taraf hidup warganya. Bagi pemerintah daerah dan perencana pembangunan, IPM adalah alat ukur yang penting untuk menentukan prioritas dan strategi pembangunan. Dengan memantau IPM, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi wilayah yang memerlukan perhatian khusus dan merancang kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk.

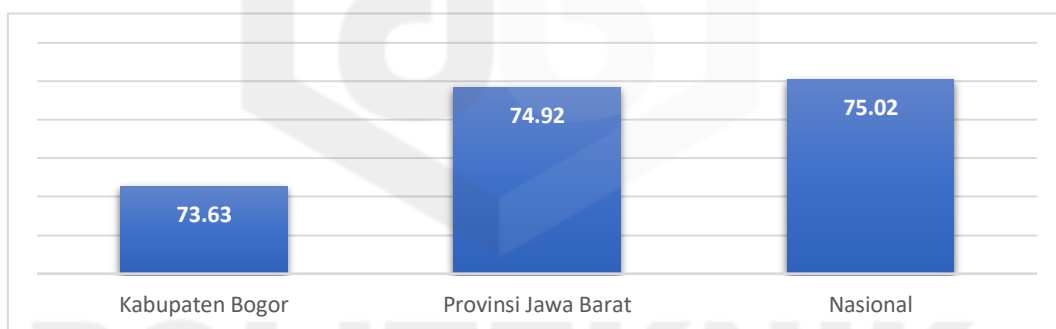
Kabupaten Bogor, sebagai salah satu wilayah dengan populasi besar di Indonesia, memiliki dinamika perkembangan IPM yang beragam di setiap kecamatannya. Gambar 1.1. menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki tren peningkatan IPM secara positif, walaupun laju peningkatannya berfluktuatif tetapi tetap memiliki tingkat kecenderungan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan konsistensi dan komitmen Pemkab Bogor untuk terus meningkatkan IPM di wilayahnya.



Sumber : BPS Kabupaten Bogor (2024)

Gambar 1.1. IPM Kabupaten Bogor Tahun 2016-2024

Secara umum, gambar 1.1. menunjukkan adanya peningkatan nilai IPM setiap tahun, meskipun terdapat fluktuasi dalam tingkat kenaikannya. Rata-rata kenaikan IPM sebesar 0,67 poin per tahun menunjukkan adanya kemajuan pembangunan yang cukup konsisten. Capaian ini mencerminkan adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pembangunan yang berfokus pada manusia, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita. Namun demikian, tren positif ini perlu ditinjau lebih dalam untuk memastikan bahwa pertumbuhan IPM tidak hanya bersifat agregat, melainkan juga merata di seluruh wilayah dan kelompok masyarakat.



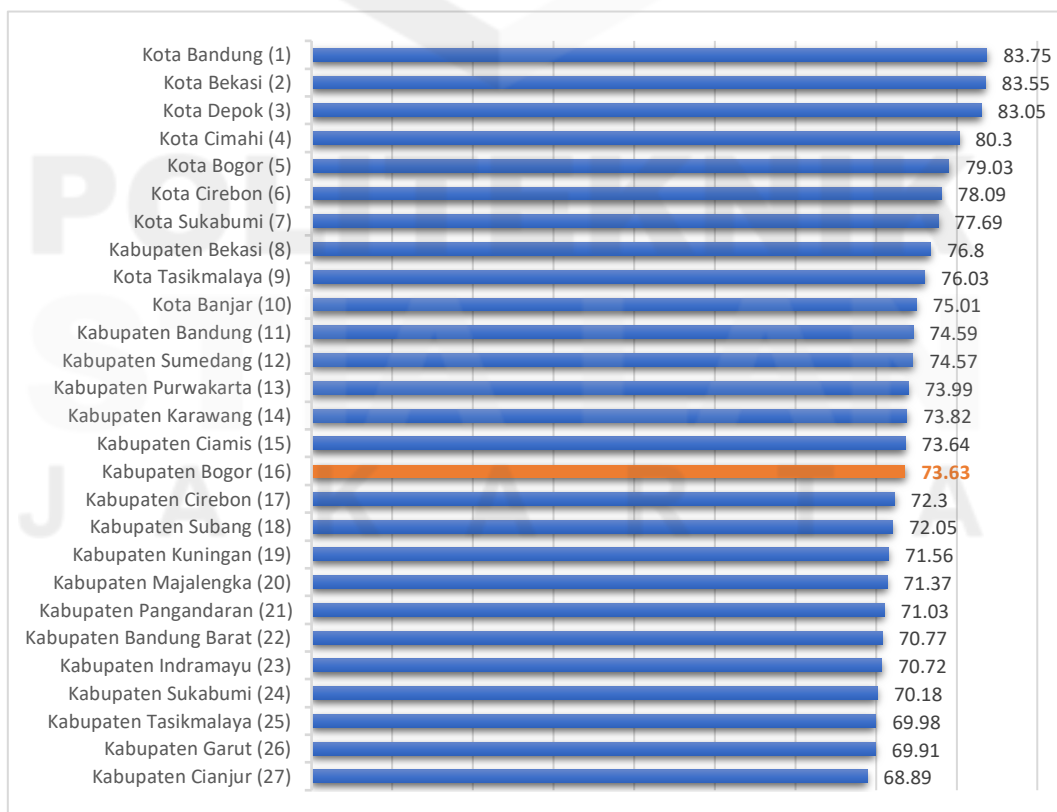
Sumber : BPS (2025), data diolah

Gambar 1.2. Perbandingan IPM Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024

Capaian IPM Kabupaten Bogor pada tahun 2024 berada di poin 73,63. Klasifikasi BPS menyebutkan bahwa nilai IPM > 70 termasuk ke dalam nilai tinggi, namun nilai IPM tersebut masih di bawah nilai IPM provinsi Jawa Barat (74,92) dan Nasional (75,02), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.2. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam upaya peningkatan IPM, terutama dari aspek pendidikan dan kesehatan. Walaupun tergolong tinggi dalam klasifikasi IPM, kesenjangan nilai ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Bogor belum mampu mengejar rata-rata pembangunan manusia secara regional maupun nasional. Oleh karena itu, upaya percepatan pembangunan, khususnya pada dimensi

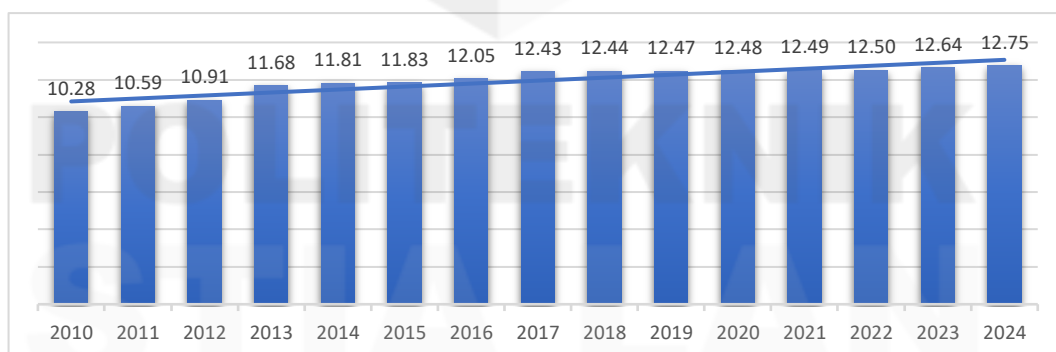
yang masih tertinggal, menjadi sangat krusial agar ketertinggalan tersebut tidak semakin melebar.

Gambar 1.3. memperlihatkan posisi IPM Kabupaten Bogor dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bogor menempati peringkat ke-16 dari seluruh kabupaten/kota yang ada. Posisi ini tergolong rendah, mengingat Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di provinsi ini. Bila dibandingkan dengan daerah terdekat seperti Kota Depok dan Kabupaten Bekasi, capaian IPM Kabupaten Bogor masih tertinggal cukup signifikan. Kota Depok menempati posisi ke-3 dengan capaian IPM yang tinggi, sedangkan Kabupaten Bekasi berada pada posisi ke-8. Ketertinggalan ini mengindikasikan perlunya strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lokal di Kabupaten Bogor untuk mengejar ketertinggalan dalam dimensi pembangunan manusia, khususnya pendidikan dan kesehatan.



Gambar 1.3. Perbandingan IPM Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

IPM memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas hidup penduduk melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dari ketiga dimensi tersebut, pendidikan memiliki peran strategis, karena menjadi prasyarat utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing. Dimensi pendidikan dalam IPM diukur melalui dua indikator, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan capaian aktual pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas, dan mencerminkan seberapa jauh masyarakat telah mengenyam pendidikan formal. Sedangkan HLS menggambarkan harapan atau peluang pendidikan yang akan ditempuh oleh anak-anak usia sekolah jika mengikuti sistem pendidikan formal secara penuh. Kedua indikator ini sangat bergantung pada ketersediaan akses pendidikan, kualitas infrastruktur pendidikan, kapasitas guru, dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan yang merata dan bermutu.



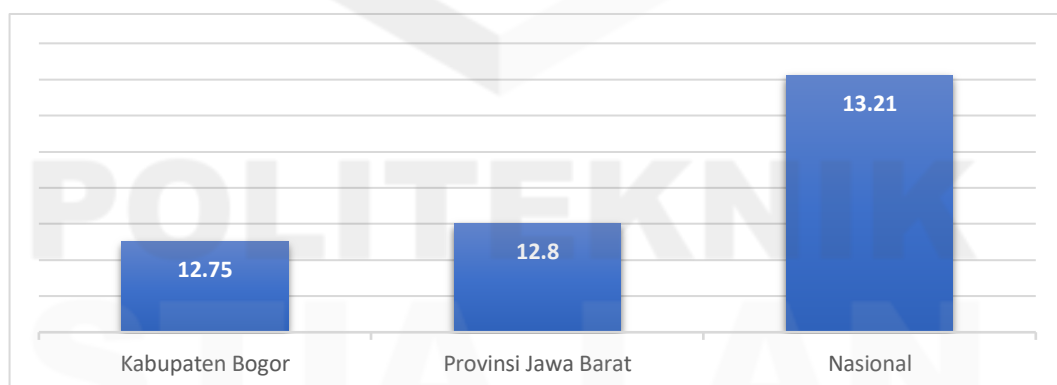
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2025)

Gambar 1.4. HLS Kabupaten Bogor Tahun 2010-2024

Berdasarkan data perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Bogor selama periode 2010 hingga 2024, gambar 1.4. menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun, yang mencerminkan adanya kemajuan dalam akses terhadap pendidikan, khususnya jenjang dasar dan menengah. Namun, laju pertumbuhan HLS cenderung melambat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun fasilitas pendidikan mungkin tersedia, masih terdapat hambatan struktural maupun sosial yang memengaruhi

ekspektasi lama sekolah anak-anak usia sekolah. Hambatan tersebut dapat berupa faktor geografis, ekonomi keluarga, atau keterbatasan layanan pendidikan di wilayah terpencil.

HLS Kabupaten Bogor masih berada di bawah capaian HLS Provinsi Jawa Barat dan nasional (Gambar 1.5.). HLS yang belum mencapai target nasional mengindikasikan bahwa sistem pendidikan di daerah belum sepenuhnya mampu menciptakan iklim belajar yang berkelanjutan dan merata. Oleh karena itu, intervensi kebijakan pendidikan harus diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar, pelatihan guru, dan pembinaan kesiswaan yang berkelanjutan. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat (2025), capaian aktual HLS Kabupaten Bogor (12,75) masih berada di bawah target nasional (13,21). Sehingga berdasarkan laju pertumbuhan rata-rata diperkirakan target HLS nasional baru akan tercapai pada pertengahan tahun 2025.

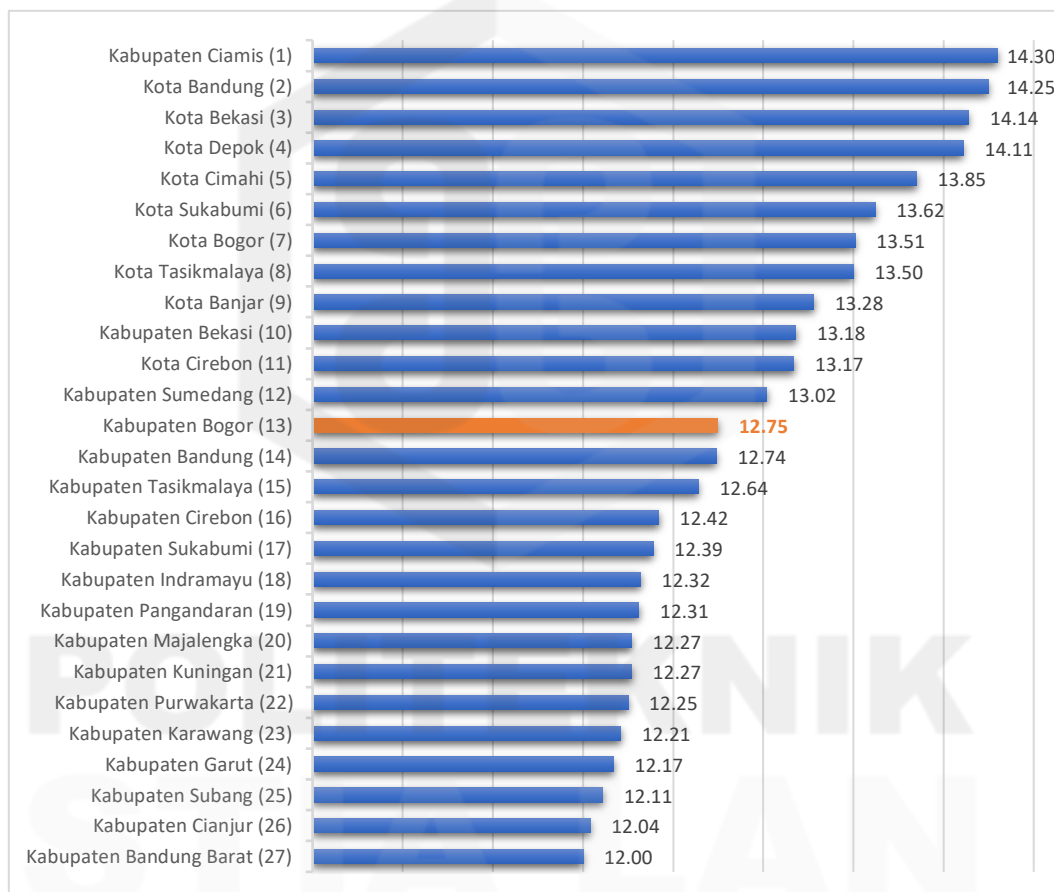


Sumber : BPS (2025), data diolah

Gambar 1.5. Perbandingan HLS Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024

Berdasarkan data perbandingan HLS antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor berada pada posisi ke-13, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata, anak-anak usia sekolah di daerah ini memiliki peluang pendidikan yang lebih rendah dibandingkan beberapa wilayah sekitarnya. Kota Depok, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor, berada di peringkat yang lebih tinggi dalam hal HLS dan menunjukkan keberhasilan dalam mendorong partisipasi pendidikan jangka panjang. Kabupaten Bekasi juga mencatat capaian HLS yang

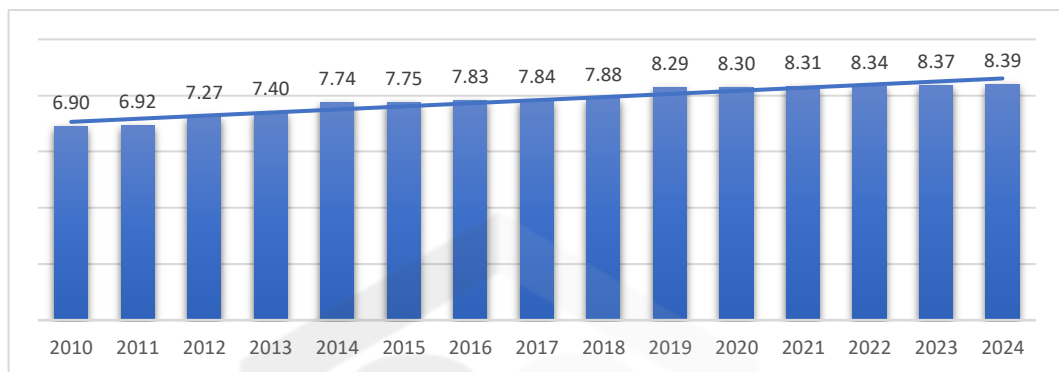
lebih baik, meskipun perbedaannya tidak terlalu jauh. Posisi Kabupaten Bogor ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam distribusi layanan pendidikan dan penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata, terutama di wilayah pinggiran dan pedesaan.



Sumber : BPS (2025), data diolah

Gambar 1.6. Perbandingan HLS Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

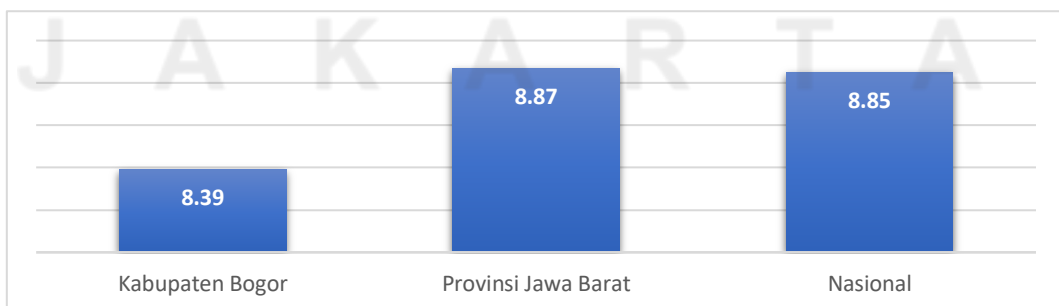
Gambar 1.7. menggambarkan perkembangan RLS penduduk Kabupaten Bogor usia 25 tahun ke atas. RLS pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 8,39 dari 8,37 di tahun sebelumnya. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun laju peningkatan pada tahun 2024 (0,02) lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya (0,03). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk dewasa belum mengenyam pendidikan formal yang cukup.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2025)

Gambar 1.7. RLS Kabupaten Bogor Tahun 2010-2024

Gambar 1.8. menunjukkan bahwa capaian RLS Kabupaten Bogor (8,39 tahun) masih berada di bawah rata-rata RLS Provinsi Jawa Barat (8,87) dan Nasional (8,85). Kondisi ini mempertegas bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Bogor masih menghadapi tantangan, khususnya dalam memberikan kesempatan belajar yang berkelanjutan bagi generasi usia kerja. Selain itu juga capaian RLS Kabupaten Bogor (8,39) belum memenuhi target RPJMN 2020–2024, yaitu sebesar 9,0 tahun. Dengan laju pertumbuhan saat ini, target tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun 2030. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya upaya percepatan pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan, melalui strategi dan kebijakan yang dinamis mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor.

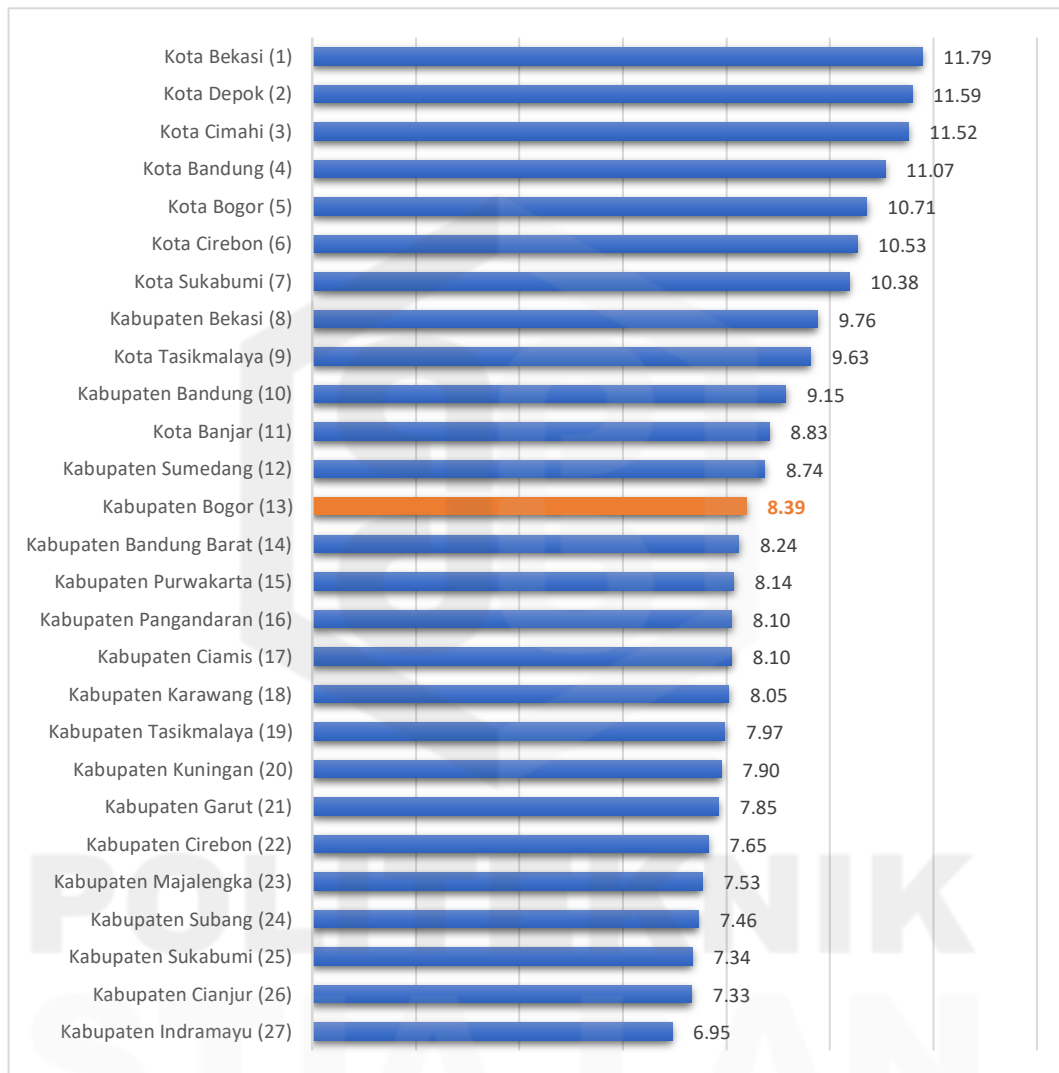


Sumber : BPS (2025), data diolah

Gambar 1.8. Perbandingan RLS Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024

Secara umum penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan minimal selama 12 tahun, yaitu setara dengan lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan wajib belajar 12 tahun. Namun, berdasarkan data perbandingan capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024, Kabupaten Bogor menempati peringkat ke-13 dari seluruh wilayah administratif provinsi ini, dengan nilai RLS sebesar 8,39 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Bogor baru menempuh pendidikan hingga kelas 2 SMP. Capaian ini menjadi penting untuk dianalisis karena RLS merupakan indikator yang mencerminkan investasi pendidikan jangka panjang suatu daerah. Nilai yang rendah menunjukkan bahwa selama beberapa dekade terakhir, masih banyak penduduk yang mengalami putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah dan tinggi.

Pada Gambar 1.9 terlihat bahwa Kabupaten Bogor menunjukkan capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Dengan nilai RLS sebesar 8,39 tahun, Kabupaten Bogor menempati peringkat ke-13 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Bogor, secara rata-rata, belum menyelesaikan pendidikan jenjang menengah pertama secara penuh. Apabila dibandingkan dengan Kota Depok, ketimpangan semakin terlihat. Kota tersebut menempati peringkat ke-2 dengan nilai RLS mendekati 11 tahun. Artinya, rata-rata penduduk dewasa di Depok hampir mencapai jenjang pendidikan menengah atas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa terdapat disparitas capaian pendidikan yang cukup tajam antara dua wilayah yang secara geografis saling berdekatan. Hal ini juga terlihat pada Kabupaten Bekasi yang mencatat nilai RLS lebih tinggi dan berada di peringkat ke-9. Padahal, baik Kabupaten Bekasi maupun Kabupaten Bogor sama-sama berstatus sebagai daerah penyangga ibu kota.



Sumber : BPS (2025), data diolah

Gambar 1.9. Perbandingan RLS Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Bogor menghadapi tantangan yang kompleks. Walaupun alokasi anggaran pendidikan secara nominal terus meningkat setiap tahun dan telah memenuhi amanat konstitusi UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yaitu sebesar minimal 20% dari APBD, namun peningkatan RLS dan HLS tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan anggaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya belanja pendidikan belum tentu berbanding lurus dengan capaian

pendidikan yang optimal, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Permasalahan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara input (belanja daerah) dan *outcome* (RLS dan HLS) yang seharusnya menjadi prioritas evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Dalam beberapa kasus, realisasi anggaran masih cenderung bersifat administratif, seperti belanja pegawai dan operasional sekolah, sehingga belum sepenuhnya menyentuh intervensi strategis yang dapat meningkatkan akses, mutu, dan partisipasi pendidikan. Selain itu, distribusi infrastruktur pendidikan yang belum merata di wilayah kecamatan pinggiran dan desa terpencil menyebabkan kesenjangan capaian pendidikan antarkawasan di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan kondisi tersebut, menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan penting dalam pembangunan manusia di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang terarah, adaptif, dan berkelanjutan untuk memperkuat dimensi pendidikan sebagai pilar utama dalam meningkatkan IPM. Penelitian ini diarahkan untuk merumuskan strategi peningkatan IPM yang fokus pada dimensi pendidikan secara lebih mendalam, guna memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan belajar yang setara, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis dimensi pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada dua indikator utama yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Fokus ini ditetapkan mengingat sektor pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang secara langsung berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dimensi kesehatan dan ekonomi yang juga membentuk struktur IPM tidak dijadikan fokus utama dalam penelitian ini. Indikator kesehatan, yaitu Umur Harapan Hidup (AHH), sangat dipengaruhi oleh intervensi sektor kesehatan

nasional seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta faktor struktural lainnya yang berada di luar kontrol pemerintah kabupaten. Sementara itu, indikator ekonomi dalam IPM, yaitu pengeluaran per kapita yang disesuaikan, berkaitan erat dengan dinamika makroekonomi, distribusi pendapatan, dan sektor informal, yang umumnya dipengaruhi oleh kebijakan lintas sektor dan lintas wilayah. Berbeda dengan kedua dimensi tersebut, pendidikan merupakan sektor yang lebih memungkinkan untuk dikendalikan melalui perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki kewenangan penuh terhadap belanja sektor pendidikan dasar dan menengah pertama, termasuk pengelolaan sarana prasarana dan sumber daya manusia pendidikan. Karena itulah, fokus pada indikator pendidikan memberikan ruang analisis yang lebih relevan, terukur, dan berada dalam jangkauan intervensi kebijakan lokal.

Secara teoritis, pendekatan pembangunan manusia menempatkan pendidikan sebagai salah satu fondasi utama dalam proses peningkatan kualitas hidup. Menurut Todaro dan Smith (2011), pendidikan tidak hanya merupakan tujuan akhir dari pembangunan, tetapi juga sarana utama untuk memperkuat kapasitas produktif dan partisipatif masyarakat. Sen (1999) bahkan menekankan bahwa kebebasan substantif seseorang untuk hidup secara bermartabat sangat ditentukan oleh akses terhadap pendidikan yang layak. Dalam perspektif *Human Development Index* (HDI) yang dikembangkan oleh UNDP (2019), pendidikan bersama dengan kesehatan dan pendapatan dianggap sebagai dimensi paling esensial dalam mengukur kemajuan pembangunan yang berpusat pada manusia. Penekanan pada dimensi pendidikan juga diperkuat oleh kondisi empiris di Kabupaten Bogor, di mana capaian indikator pendidikan masih menunjukkan kesenjangan antarkecamatan serta belum sepenuhnya mencapai target nasional. Oleh karena itu, fokus penelitian diarahkan pada strategi optimalisasi belanja daerah sektor pendidikan sebagai titik masuk utama dalam memperkuat IPM secara berkelanjutan dan terukur.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kenaikan IPM Kabupaten Bogor belum menunjukkan dampak merata terhadap seluruh dimensi, khususnya dimensi pendidikan;
2. Terdapat ketimpangan capaian pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Bogor;
3. Peningkatan indikator pendidikan belum sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah;
4. Perencanaan pembangunan sektor pendidikan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan peningkatan kualitas dan pemerataan layanan;
5. Pemantauan terhadap capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) belum menunjukkan tren yang konsisten menuju target nasional;
6. Capaian HLS di Kabupaten Bogor masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
7. RLS di Kabupaten Bogor belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020–2024;
8. Struktur dan distribusi layanan pendidikan belum mendukung akselerasi pencapaian IPM di semua kecamatan;
9. Perumusan strategi pendidikan belum sepenuhnya berbasis pada analisis capaian indikator IPM dimensi pendidikan;

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang diambil dari latar belakang tulisan ini, maka rumusan masalah yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa peningkatan IPM pada dimensi pendidikan belum optimal ?
2. Bagaimana strategi peningkatan IPM pada dimensi pendidikan di Kabupaten Bogor ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan IPM pada dimensi pendidikan di Kabupaten Bogor belum optimal.
2. Merumuskan strategi peningkatan IPM pada dimensi pendidikan di Kabupaten Bogor.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif solusi pemecahan masalah pemerintah daerah Kabupaten Bogor, terutama dalam menentukan hal yang harus dilakukan dalam menentukan langkah perencanaan agar menjadi lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi Kabupaten Bogor melalui peningkatan IPM khususnya di bidang pendidikan.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Peningkatan IPM pada dimensi pendidikan di Kabupaten Bogor belum optimal karena adanya ketimpangan infrastruktur dan layanan pendidikan antarwilayah, kekurangan guru ASN dan kepala sekolah definitif, serta akses pendidikan yang terbatas di daerah terpencil. Kesenjangan yang signifikan antar kecamatan, baik dalam HLS maupun RLS, menunjukkan pentingnya pemerataan fasilitas pendidikan, pembangunan sekolah, dan penyediaan beasiswa untuk mengurangi ketertinggalan di wilayah-wilayah terpencil. Meskipun alokasi anggaran pendidikan cukup besar, pelaksanaan program strategis masih terkendala oleh ketidakefisienan tata kelola, tekanan politik, serta minimnya pemanfaatan data dalam perencanaan. Upaya integrasi program lintas sektor dan peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya pendidikan perlu dilakukan guna mendukung pencapaian target pendidikan yang lebih merata dan tepat sasaran di masa mendatang.
2. Strategi peningkatan IPM pada dimensi pendidikan di Kabupaten Bogor dirumuskan dalam beberapa alternatif berdasarkan prioritas faktor kunci hasil analisis SWOT-AHP (khususnya S2, T4, T2, W4, dan O2). Strategi tersebut mencakup pemanfaatan teknologi digital untuk pemerataan akses dan peningkatan kualitas guru di daerah terpencil; prioritas dalam rekrutmen dan penempatan guru serta kepala sekolah di wilayah yang kurang terlayani; penguatan sistem perencanaan dan pengelolaan pendidikan agar lebih stabil dan berbasis kebutuhan prioritas; pengembangan program pelatihan guru yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus daerah terpencil; serta peningkatan kompetensi pendidik melalui integrasi sistem pembelajaran digital secara berkelanjutan. Alternatif strategi ini memberikan opsi berbasis analisis untuk meningkatkan efektivitas upaya dalam mencapai capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bogor.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan penelitian, beberapa saran berikut diajukan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya pendidikan dalam mendukung peningkatan IPM. Saran ini berlandaskan prioritas faktor kunci yang teridentifikasi, dengan harapan pengelolaan sektor pendidikan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berdampak signifikan.

1. Pemerintah Kabupaten Bogor perlu memperkuat program pelatihan guru secara berkelanjutan, khususnya di wilayah dengan capaian HLS dan RLS rendah. Pelatihan hendaknya difokuskan pada peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan lokal serta mengoptimalkan pendekatan digital. Untuk mendukung hal ini, peningkatan kapasitas SDM pendidikan harus dilakukan melalui pelatihan daring, lokakarya tatap muka, serta penyediaan perangkat pendukung, dengan cakupan diperluas hingga wilayah pinggiran dan sulit dijangkau. Selain peningkatan kompetensi, kebijakan daerah juga perlu secara serius mendorong percepatan dan perluasan sertifikasi guru, terutama bagi guru yang sudah lama mengabdikan namun belum tersertifikasi. Sertifikasi guru tidak hanya menjadi indikator profesionalisme, tetapi juga berdampak pada kualitas pembelajaran dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan di daerah.
2. Distribusi tenaga pendidik dan kepala sekolah wajib menjadi prioritas dalam pengelolaan sumber daya pendidikan. Pemerintah daerah disarankan menyusun formasi ASN berdasarkan kebutuhan nyata sekolah. Dukungan berupa insentif, tunjangan penugasan khusus, dan fasilitas logistik untuk penempatan guru perlu diprioritaskan, terutama untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga pendidik antar kecamatan.
3. Pemerintah daerah perlu membuat aturan atau kebijakan yang jelas untuk menjaga keberlanjutan program pendidikan. Program penting seperti pembangunan ruang kelas baru, penyediaan sarana belajar, dan pemberian beasiswa harus terlaksana tanpa gangguan dari tekanan politik atau keterbatasan dana. Penetapan target yang jelas dan terukur wajib dilakukan

berdasarkan data capaian IPM dan peta ketimpangan wilayah. Penyusunan rencana kerja dan program pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar keinginan sesaat.

4. Transformasi digital dalam dunia pendidikan perlu menjadi prioritas utama dalam pengembangan infrastruktur dan sarana pembelajaran. Pemerintah daerah harus menyediakan fasilitas jaringan internet sekolah, perangkat pembelajaran daring, dan penguatan sistem manajemen pembelajaran digital. Fokus diarahkan pada perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan di daerah terpencil yang sulit dijangkau secara fisik, sehingga digitalisasi dapat menjadi sarana penghubung untuk mengatasi disparitas layanan.
5. Program pelatihan guru dan peningkatan mutu pembelajaran harus dirancang secara tematik dan kontekstual sesuai tantangan wilayah masing-masing. Dinas Pendidikan perlu mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pengembangan kurikulum lokal, pelatihan pembelajaran multigrade, serta pendekatan berbasis komunitas. Upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sebaiknya difokuskan pada sekolah dengan capaian HLS dan RLS rendah agar lebih tepat sasaran dan efektif mendorong perubahan.
6. Selain lima strategi utama tersebut, terdapat pula strategi pendukung yang penting untuk segera diimplementasikan. Pemerintah Kabupaten Bogor disarankan menyesuaikan rasio jumlah SD dan SMP dengan pembangunan SMP satu atap di wilayah dengan ketimpangan tinggi. Diversifikasi akses pendidikan melalui penguatan beasiswa dan digitalisasi juga perlu didukung dengan penyediaan perangkat serta kuota belajar daring sesuai kebutuhan siswa. Selanjutnya, sektor pendidikan nonformal dan alternatif dapat difokuskan pada pembentukan pusat belajar komunitas di kecamatan rawan putus sekolah, dengan melibatkan PKBM dan tokoh masyarakat setempat. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan harus dilaksanakan berdasarkan peta spasial ketimpangan layanan yang terintegrasi dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Terakhir, reformasi ketahanan fiskal pendidikan melalui pembentukan dana cadangan sangat penting untuk

melindungi program prioritas dari tekanan politik dan fluktuasi pendanaan, yang harus diatur secara teknis dalam regulasi dan perencanaan tahunan.

7. Penelitian ini telah mengidentifikasi faktor kunci serta merumuskan strategi peningkatan IPM dimensi pendidikan melalui pendekatan SWOT-AHP. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperdalam evaluasi dan prioritas alternatif strategi menggunakan metode multikriteria seperti AHP lanjutan. Pendekatan kuantitatif juga dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara pemanfaatan sumber daya pendidikan dan capaian HLS/RLS. Selain itu, penelitian komparatif di wilayah lain serta kajian tantangan implementasi dan praktik terbaik dapat memperkuat dasar kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M., & Kabir, R. (2020). Human Capital and Government Spending on Education in Developing Countries: A Case Study of Bangladesh. *Economics Bulletin*, 40(3), 2068–2075.
- Ali, M., & Zafar, A. (2021). Analyzing Human Development and Education Investment in Pakistan Using AHP. *South Asian Economic Review*, 14(2), 77–90.
- Anggraini, Y. (2023). Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Indocamp.
- Assauri, S. (2016). *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantage*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2021). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor Tahun 2024. BPS Kabupaten Bogor.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2024. BPS Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2024). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor Tahun 2020. BPS Kabupaten Bogor.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2025). Dashboard Statistik. Diakses pada 18 April 2025, dari <https://statistik.jabarprov.go.id>.
- Bappedalitbang Kabupaten Bogor. (2024). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023. Bappedalitbang Kabupaten Bogor.
- Bangun, W. (2021). *Pembangunan Sumber Daya Manusia: Teori dan Kasus di Indonesia dan Negara-Negara ASEAN Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *Public Administration: An Action Orientation* (8th ed.). Cengage Learning.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications.

- Edward, A. V., Adnan, M. F., & Khaidir, A. (2024). *New Public Manajemen: Studi Kasus Penerapan New Public Manajemen dalam Organisasi Publik di Indonesia*. Future Academia.
- Firdaus, M., & Hidayat, A. (2021). Strategi Peningkatan IPM Melalui Integrasi Program Pendidikan dan Kesehatan. *Jurnal Strategi Pembangunan*, 9(3), 49–61.
- Fitriani, Y., & Herlambang, T. (2021). Analisis Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Menggunakan SWOT. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 123–132.
- Flynn, N., & Asquer, A. (2022). *Public sector management* (8th ed.). SAGE Publications.
- Gani, I. A., & Nurmiati. (2023). *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Teori, Kebijakan dan Praktik Berbasis Kompetensi di Era Digitalisasi*.
- Ginting, D. Y. br., Ginting, R. br., & Sembiring, D. J. M. (2020). *Sistem Pendukung Keputusan dengan Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP)*. Andi.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto, A. T., & Siswanta. (2021). *Teori Pembangunan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hossain, A., & Rahman, M. (2022). The Role of Government Education Expenditure on Human Development: A Study in South Asia. *International Journal of Development Research*, 12(4), 7150–7156.
- Jasasila (2020). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang Hari 2011-2019. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), Mei 2020, 40-44.
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional. Diakses dari <https://jdih.kemdikbud.go.id>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses dari <https://jdih.kemdikbud.go.id>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). Pendidikan di Indonesia: Tantangan dan Solusi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Laporan Kesehatan Indonesia 2023. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). Perkembangan UMKM di Indonesia 2023. Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Kettl, D. F. (2015). *The Politics of the Administrative Process* (7th ed.). CQ Press.
- Kiha, E.K., Seran, S., Lau, H.T. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, Vol.2 No. 07 - Februari 2021.
- Kulakowski, K. (2020). *Understanding the Analytic Hierarchy Process*. CRC Press.
- Kuncoro, M. (2023). Analysis of modernization theory in the perspective of Rostow's economic growth theory. *Journal of Economic Development Studies*, 18(2), 45-67.
- Kusumawardani, M., & Syahrudin, A. (2021). Perencanaan Strategis Peningkatan IPM Kota Semarang dengan Pendekatan SWOT-AHP. *Jurnal Manajemen Strategis*, 9(2), 112–124.

- Lestari, D., & Nugroho, A. (2023). Optimalisasi Anggaran Pendidikan dalam Peningkatan IPM Kabupaten Klaten. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 11(1), 25–37.
- Lubis, C.K.S., Sari, C.M., Syahfitri, T.I., Suharianto, J. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara Tahun 2019-2022. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 3 No. 1 - Januari 2024.
- Mahi, A. K. (2015). *Pengembangan Wilayah: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muta'ali, L. (2015). *Teknik Analisis Regional: Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Majid, J. (2023). *Manajemen Sektor Publik: Konsep dan Teori*. Purbalingga, CV. Sketsa Media.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marsono. (2020). Penggunaan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Penelitian. In *Media*
- Miladia, A. (2024). Pengaruh Luas Wilayah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Pasca Covid-19. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol 4 No. 01 - Juli 2024.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Nurullistiyani, N., Zulfikar, R., Jaelani, A., & Susanto, D. (2022). Determination Strategies for HDI Improvement Using SWOT Matrix Toward Sustainable Development and Good Environment. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1111(1), 012074.
- Obuah, E. E., & Komi, G. B. L. (2023). Negotiating with the IMF: The case of Somalia and Jamaica. *International Journal of Economic Development*, 29(4), 85-102.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Prasetyo, D., & Setyowati, R. (2020). Evaluasi Strategi Pembangunan Manusia di Kabupaten Sleman Menggunakan SWOT-AHP. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 45–60.
- Rachmawati, I., & Saputra, R. (2022). Analisis Strategi Optimalisasi Belanja Pendidikan Terhadap IPM Menggunakan AHP. *Jurnal Kebijakan dan Anggaran Publik*, 5(1), 45–53.
- Rangkuti, F. (2015). Analisis SWOT. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, F. (2017). Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rejeki, H., & Maulidah, I. (2020). Strategi Penguatan IPM Melalui Perencanaan Pembangunan Pendidikan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 98–108.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
- Simamarta, Y.W., Iskandar, D.D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Jumlah Penduduk, Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan IPM: Analisa Two Stage Least Square untuk Kasus Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 5 No. 1 (2022) hlm. 78-94.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* (2nd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, T., & Kurniawan, R. (2019). Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan IPM Melalui Penganggaran Pendidikan. *Jurnal Keuangan Publik*, 7(2), 33–45.

- Susanto, E. R., & Puspaningrum, A. S. (2020). Model Prioritas Program Pemerataan IPM di Provinsi Lampung menggunakan metode Analytic Hierarchy Process. *Jurnal Teknoinfo*, 14(1), 9–14. <https://doi.org/10.33365/jti.v14i1.543>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development* (11th ed.). Boston: Addison-Wesley.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- United Nations Development Programme. (1990). *Human Development Report 1990*. UNDP.
- United Nations Development Programme. (2020). *Human Development Report 2020*. United Nations Development Programme.
- UNESCO Institute for Statistics. (2011). *International Standard Classification of Education (ISCED) 2011*. Montreal: UNESCO.
- Wulandari, D., & Wijaya, Y. (2019). Strategi Peningkatan IPM Kabupaten Kediri melalui AHP dan SWOT. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 10(1), 55–64.
- Yamamoto, K. (2018). Government Expenditure and Human Development: Evidence from Asian Countries. *Journal of Asian Economics*, 57, 45–58.